
Parlemen Malaysia harus diizinkan untuk bersidang selama keadaan darurat, kata anggota parlemen Asia Tenggara

Lebih dari 80 anggota parlemen sekawasan hari ini menyatakan keprihatinannya atas kekuasaan yang terlalu luas yang diserahkan kepada pihak berwenang Malaysia di bawah keadaan darurat saat ini, dan mendesak Raja Malaysia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Perdana Menteri untuk mengadakan sidang parlemen sesegera mungkin.

Dalam pernyataan bertanda tangan, ke-89 mantan anggota dan anggota parlemen saat ini yang dipilih secara demokratis dari enam negara juga meminta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat untuk memastikan bahwa komisi-komisi di parlemen diaktifkan dan agar mereka mengadakan rapat sebagaimana biasanya.

“Fakta bahwa begitu banyak anggota parlemen dari seluruh wilayah ini menyuarakan hal ini menunjukkan tingkat keprihatinan regional atas dampak [kekuasaan] darurat itu pada demokrasi parlementer di Malaysia, dan atas kemungkinan implikasi jangka panjang yang dapat ditimbulkannya pada kehidupan rakyat. Kami telah melihat bagaimana langkah-langkah terkait pandemi yang diadopsi di negara-negara Asia Tenggara lainnya semakin membatasi hak asasi manusia dan pengawalan yang memadai harus diberlakukan,” kata Tom Villarin, Anggota Dewan ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) dan mantan Anggota Filipina Parlemen (MP).

*“Meskipun menjadi prioritas bagi pemerintah untuk menangani COVID-19, sangat penting bahwa tanggapan semacam itu mengambil pendekatan berbasis hak asasi manusia dan menghormati aturan hukum. Alih-alih, keadaan darurat di Malaysia tidak hanya memusatkan kekuasaan yang terlalu luas pada eksekutif, tetapi juga menghapus pengawasan nyata, membuka lebar pintu bagi pelanggaran hak-hak tersebut,”*kata Villarin.

Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 pada Januari, Raja Malaysia mengumumkan keadaan darurat nasional sejak 11 Januari hingga 1 Agustus. Secara khusus, anggota parlemen menyoroti kewenangan pejabat yang menjangkau jauh dan tidak terkendali di bawah UU Ordinan Darurat 2021 (*Emergency (Essential Powers) Ordinance 2021*), termasuk kewenangan tambahan bagi angkatan bersenjata, penangguhan sidang-sidang parlemen dan majelis negara bagian, penundaan pemilu, dan kekebalan hukum atas tindakan pihak berwenang yang dilakukan dengan "niat baik".

Langkah-langkah ini mengabaikan standar internasional, sangat merusak proses demokrasi, dan mendorong matangnya lingkungan bagi potensi penyalahgunaan kekuasaan, kata APHR. Di bawah hukum internasional, tindakan darurat harus diperlukan dan proporsional

dalam mencapai hasil yang diinginkan, sementara, diterapkan dengan cara non-diskriminatif, dan dapat ditinjau.

"Pemerintahan jalan belakang yang ditempuh Perdana Menteri Muhyiddin tidak pernah stabil sejak pengambilalihan pada tahun lalu, dan langkah terbaru ini adalah upaya putus asa untuk mempertahankan kekuasaan, ketimbang menangani krisis kesehatan secara efektif," kata Villarín.

"Ini bukan waktunya untuk membungkam anggota parlemen. Pada saat krisis kesehatan, sangatlah penting bahwa parlemen dapat berfungsi secara efektif untuk mengkaji tindakan dan kebijakan pemerintah, termasuk yang digunakan dalam menanggapi pandemi. Yang dibutuhkan dunia saat ini adalah transparansi dan akuntabilitas, bukan pemerintah yang berlindung dari pengawasan publik," tambahnya.

Parlemen Malaysia sebelumnya menghadapi pembatasan karena pandemi. Pada November 2020, Dewan Perwakilan Rakyat mengadopsi langkah-langkah pencegahan COVID-19, termasuk mempersingkat jam sidang dan acara kerja, dan membatasi maksimum 80 anggota parlemen dalam pleno pada satu waktu. Sidang parlemen Maret-April pada 2020 juga ditunda dan dikurangi menjadi satu hari sidang pada Mei, tanpa kemungkinan melakukan debat.

Beberapa upaya hukum telah diajukan terkait dengan keadaan darurat tersebut, termasuk gugatan publik yang diajukan oleh organisasi masyarakat sipil untuk meninjau, ulang, antara lain, penangguhan parlemen.

Latar Belakang

Malaysia telah menghadapi pergolakan politik dalam setahun terakhir, dan pada Maret 2020 Perdana Menteri Muhyiddin Yassin muncul sebagai pemimpin koalisi dengan mayoritas hanya dari sejumlah anggota parlemen setelah mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamed mengundurkan diri. Situasi ini menyebabkan seruan agar diadakan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Muhyiddin, serta spekulasi bahwa pemilihan cepat dapat dilakukan. Awal tahun ini, beberapa anggota parlemen menarik dukungan mereka untuk Perdana Menteri, sehingga mengancam suara mayoritasnya yang sudah tipis di parlemen.